

**PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT
(COMMUNITY BASED ECOTOURISM) DALAM RANGKA
MENGENTASKAN KEMISKINAN DI DESA KARANGSONG
KABUPATEN INDRAMAYU**

**THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY BASED ECOTOURISM IN SOLVING THE POVERTY IN
KARANGSONG VILLAGE-INDRAMAYU REGENCY**

Lia Afriza, Titing Kartika, Anti Riyanti

STIEPAR YAPARI Bandung

ABSTRAK

Mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018, kebijakan pembangunan wilayah pengembangan dimaksudkan untuk peningkatan ekonomi yang diharapkan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah wilayah pengembangan Ciayumajakuning (Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Pada penelitian ini lokus Kabupaten Indramayu khususnya Desa Karangsong dipilih dengan pertimbangan bahwa Indramayu menjadi bagian wilayah pengembangan dengan potensi pesisir dan kelautan khususnya mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model pengentasan kemiskinan yang ada di Desa Karangsong melalui sektor pariwisata khususnya pengembangan potensi mangrove. Berdasarkan data Desa Karangsong (2014) tingkat kemiskinan di Karangsong cukup tinggi yakni sekitar 38.1% atau sekitar 2.192 orang, padahal jika dilihat dari potensi yang dimiliki Karangsong memiliki potensi alam laut dan pesisir khususnya mangrove yang dapat dijadikan peluang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Mangrove tidak hanya sebagai pendekatan ekonomi namun juga potensi alamnya dapat dijadikan sebagai upaya pelestarian alam sehingga kedepannya pola pengembangan ini akan sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (tourism sustainable development). Pendekatan lain dari upaya pengentasan kemiskinan ini juga dilakukan melalui empat jalur strategi (four track strategy). Strategi empat jalur pembangunan ekonomi itu meliputi pembangunan ekonomi yang pro pertumbuhan (pro growth), pro penciptaan lapangan pekerjaan (pro job), pro pengurangan kemiskinan (pro poor), dan pro lingkungan (pro environment). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara yang ditindaklanjuti dengan FGD (Focus Group Discussion). Kegiatan penelitian ini akan melibatkan berbagai pihak diantaranya pemerintah, swasta (industri), asosiasi, serta masyarakat, nelayan, kelompok petani sehingga bentuk model yang dihasilkan adalah bentuk integrasi yang dapat memberikan multiplier effect (dampak berganda) di lintas sektor dimana pariwisata berperan sebagai leading sector. Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan yang terjadi pada pengelolaan kawasan mangrove adalah pengetahuan masyarakat itu sendiri. Sementara itu potensi yang dimiliki meliputi sumber daya alam kawasan mangrove, sungai dan pesisir pantai. Model yang dapat dikembangkan dalam upaya mengembangkan potensi wisata mangrove di daerah Karangsong dapat berupa model kolaborasi yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan industri pariwisata.

Kata Kunci: Ekowisata, Pariwisata Berbasis Masyarakat, Pengentasan Kemiskinan

ABSTRACT

Referring to the RPJMD (long and medium term development plan) of West Java Province 2013-2018, the development area development policy is intended for economic improvement which is expected to provide an increase in people's welfare, one of which is the development of Ciayumajakuning (Kabupaten and Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Majalengka and Kuningan). In this study locus of Indramayu Regency especially Karangsong Village chosen with consideration that Indramayu become part of development area with coastal and marine potency especially mangrove. This study aims to produce existing poverty alleviation model in Karangsong Village through tourism sector especially development of mangrove potency. Based on data from Karangsong Village (2014), the poverty rate in Karangsong is quite high at around 38.1%. or about 2192 people, whereas if viewed from the potential owned Karangsong has the potential of marine and coastal nature, especially mangrove that can be an opportunity in increasing public income. Mangrove not only as an economic approach but also its natural potential can be used as an effort to conserve nature so that future development pattern will be in accordance with the principle of tourism sustainable development. Another approach of poverty alleviation is also done through four strategy paths (four track strategy). The four-track economic development strategy includes pro-growth economic development, pro-job, pro poor, and pro environment. The method used in this research is observation and interview which is followed up by FGD (Focus Group Discussion). This research involved various parties such as government, private (industry), association, and community, fisherman, farmer group so that the model form generated is a form of integration that can give multiplier effect in cross sectors where tourism acts as leading sector. Based on the results of research, the problems that occur in the management of mangrove area is the knowledge of the community itself. Meanwhile, the potential that is owned include natural resources mangrove area, river and the coastal. The models that can be developed in an effort to develop mangrove tourism potential in Karangsong area can be a collaboration model involving the community, government and tourism industry.

Key Words: Ecotourism, Community Based Tourism, Poverty Alleviation

Diterima : 12 Januari 2018
Diproses : 25 Januari 2018
Diterbitkan : 20 Februari 2017

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi wisata yang sangat besar, baik dilihat dari alam, sejarah maupun budayanya yang tersebar dalam 27 (dua puluh tujuh) Kota dan Kabupaten. Namun seiring dengan perkembangannya, pariwisata di Jawa Barat belum mampu memberikan solusi yang strategis terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Padahal jika mengacu pada UU Kepariwisata No.10 Tahun 2009 salah satu prinsip penyelenggaraan

kepariwisataan adalah memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat serta memberdayakan masyarakat setempat.

Sementara itu visi pembangunan Jawa Barat sebagai Provinsi Termaju di Indonesia pada tahun 2025 yang ditandai dengan 7 (tujuh) karakter diantaranya pengelolaan pertanian dan kelautan, infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan dan pengembangan budaya lokal serta menjadi destinasi wisata dunia. Mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018,

kebijakan pembangunan wilayah pengembangan dimaksudkan untuk peningkatan ekonomi yang diharapkan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah wilayah pengembangan Ciayumajakuning (Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Majalengka dan Kuningan).

Pada penelitian ini lokus Kabupaten Indramayu khususnya di Desa Karangsong dipilih dengan pertimbangan bahwa Indramayu menjadi bagian wilayah pengembangan dengan potensi pesisir dan kelautan khususnya mangrove. Namun dengan potensi yang dimiliki belum dapat memberikan nilai manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan tata kelola yang baik seperti adanya membangun kesadaran wisata bagi masyarakat akan potensi pesisir, pemberdayaan masyarakat, membangun kemandirian yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan.

Berdasarkan gambaran di atas, maka penelitian ini memiliki identifikasi masalah mencakup:

1. Bagaimana permasalahan pengelolaan di kawasan mangrove
2. Bagaimana potensi yang ada di kawasan mangrove sehingga dapat menjadi kawasan yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dalam pengembangan ekowisata
3. Bagaimana model pengembangan ekowisata dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Karangsong

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Ekowisata

Ekowisata merupakan salah satu usaha yang memprioritaskan berbagai produk-produk pariwisata berdasarkan sumberdaya alam, pengelolaan ekowisata untuk

meminimalkan dampak terhadap lingkungan hidup, pendidikan yang berasaskan lingkungan hidup, sumbangan kepada upaya konservasi dan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat lokal (World Tourism Organization, 2002). Pengertian lain dari Ekowisata pertama kali dikemukakan oleh Hector Ceballos-Lascurain pada tahun 1987 yaitu sebagai berikut : "Nature or ecotourism can be defined as tourism that consist in travelling to relatively undisturbed or uncontaminated natural areas with the specific objectives of studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild plants and animals, as well as any existing cultural manifestations (both past and present) found in the areas." "Wisata alam atau pariwisata ekologis adalah perjalanan ke tempat-tempat alami yang relatif masih belum terganggu atau terkontaminasi (tercemari) dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, tumbuh-tumbuhan dan satwa liar, serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa kini." Kemudian pada awal tahun 1990 disempurnakan oleh The International Ecotourism Society (TIES) yaitu sebagai berikut: "Ecotourism is responsible travel to natural areas which conserved the environment and improves the welfare of *local people*." "Ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke tempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat". Westren dalam Fandeli (1998) mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan bertanggungjawab ke wilayah-wilayah alami yang melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Fennell (1999) mendefinisikan ekowisata sebagai bentuk berkelanjutan berbasis sumber daya alam pariwisata yang berfokus terutama pada mengalami dan belajar tentang alam, dan yang berhasil etis

dampak rendah, non-konsumtif dan berorientasi lokal (kontrol, manfaat dan keuntungan dan skala). Dowling (1996, dalam Hill & Gale, 2009) menyatakan bahwa ekowisata dapat dilihat berdasarkan keterkaitannya dengan 5 elemen inti, yaitu bersifat alami, berkelanjutan secara ekologis, lingkungannya bersifat edukatif, menguntungkan masyarakat lokal, dan menciptakan kepuasan wisatawan.

Ekowisata juga menjadi sebuah peluang karena terjadinya pergeseran konsep kepariwisataan dunia yang disebabkan oleh kejenuhan wisatawan dan menjadi penikmat wisata berbasis alam dan budaya penduduk lokal (Satria, 2009). Sementara konsep pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism) menurut Murphy (1985) memiliki beberapa prinsip yaitu mengakui, mendukung dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat, melibatkan anggota masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, menjamin sustainabilitas lingkungan, memelihara karakter dan budaya lokal yang unik.

Dengan demikian konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melalui ekowisata menjadi sangat penting karena ini juga bagian dari konservasi lingkungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Garrod dan Wilson, 2003).

Prinsip Pengembangan Ekowisata

Tujuan utama pembangunan pariwisata untuk: 1) Persatuan dan kesatuan bangsa, 2) Penghapusan kemiskinan (Poverty Alleviation), 3) Pembangunan berkesinambungan (Sustainable Development), 4) Pelestarian budaya, 5) Pemenuhan kebutuhan hidup dan hak azasi manusia, 6) Pendekatan ekonomi dan industri, 7) Pengembangan teknologi (Hadiwijoyo 2012:50). Sementara itu secara konseptual ekowisata merupakan suatu

konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sehingga memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Prinsip dasar itu meliputi:

Prinsip Konservasi

Prinsip konservasi menekankan pada upaya memelihara, melindungi serta kontribusi dalam memperbaiki sumber daya alam. Selain itu juga, melalui pengembangan ekowisata diharapkan masyarakat memiliki rasa kepedulian, rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian alam dan budaya.

Prinsip Partisipasi Masyarakat

Masyarakat menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan ekowisata. Dengan demikian dalam proses pengembangannya harus didasarkan pada hasil musyawarah dan atau persetujuan masyarakat disertai dengan menghormati nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya:

- a. Melakukan penelitian dan perencanaan terpadu dalam pengembangan ekowisata.
- b. Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata.
- c. Menggugah prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat untuk pengembangan ekowisata
- d. Memberi kebebasan kepada masyarakat untuk bisa menerima atau menolak pengembangan ekowisata.
- e. Menginformasikan secara jelas dan benar konsep serta tujuan pengembangan ekowisata.
- f. Membuka kesempatan untuk melakukan dialog dengan seluruh pihak yang terlibat (*multi-*

stakeholders) dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata.

- g. Membentuk kerjasama dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dilanggarnya peraturan yang berlaku.

1. Prinsip Edukasi

Pengembangan ekowisata harus mengandung prinsip pendidikan untuk mengubah sikap atau perilaku dalam meningkatkan rasa tanggung jawab, kepedulian dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Prinsip edukasi ini memiliki kriteria:

- a. Mengoptimalkan keunikan dan kekhasan daerah sebagai daya tarik wisata
- b. Memanfaatkan dan mengoptimalkan pengetahuan tradisional berbasis pelestarian alam dan budaya serta nilai-nilai yang dikandung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai nilai tambah
- c. Mengoptimalkan peran masyarakat sebagai interpreter lokal dari produk ekowisata.
- d. Memberikan pengalaman yang berkualitas dan bernilai bagi pengunjung.
- e. Dikemas ke dalam bentuk dan teknik penyampaian yang komunikatif dan inovatif.

2. Prinsip Wisata

Prinsip pengembangan ekowisata memiliki keterkaitan dengan wisatawan untuk mendapatkan rasa aman, nyaman dan kepuasan selama mengikuti kegiatan ekowisata. Prinsip wisata ini meliputi kriteria:

- a. Mengoptimalkan keunikan dan kekhasan daerah sebagai daya tarik wisata.

- b. Membuat Standar Prosedur Operasi (SPO) untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- c. Menyediakan fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan pengunjung, kondisi setempat dan mengoptimalkan kandungan material lokal.
- d. Memprioritaskan kebersihan dan kesehatan dalam segala bentuk pelayanan, baik fasilitas maupun jasa.
- e. Memberikan kemudahan pelayanan jasa dan informasi yang benar.
- f. Memprioritaskan keramahan dalam setiap pelayanan.

Sementara itu, J. Stphen, Page dan Dowling K. Ross (2000) mengelaborasi mengenai konsep dasar ekowisata menjadi lima prinsip inti, termasuk yang berbasis alam, berkelanjutan secara ekologis, lingkungan edukatif, lokal wisatawan bermanfaat serta menghasilkan kepuasan:

1. *Nature based* (Berbasis alam)
2. Pengembangan ekowisata didasarkan pada lingkungan alam dengan fokus pada lingkungan biologi, fisik dan budaya
3. *Ecologically sustainable* (Berkelanjutan secara ekologis)
4. *Ecotourism* dapat memberikan acuan terhadap pariwisata secara keseluruhan dan dapat membuat ekologi yang berkesinambungan.
5. *Environmentally educative* (Pendidikan lingkungan)
6. Pengembangan ekowisata harus mengandung unsur pendidikan atau perilaku seseorang menjadi memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan.
7. *Locally beneficial* (Manfaat bagi masyarakat lokal)
8. Pengembangan *ecotourism* harus dapat menciptakan keuntungan yang nyata bagi masyarakat sekitar.

Pengembangan harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat serta peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya serta tradisi keagamaan yang dianut masyarakat di sekitar kawasan.

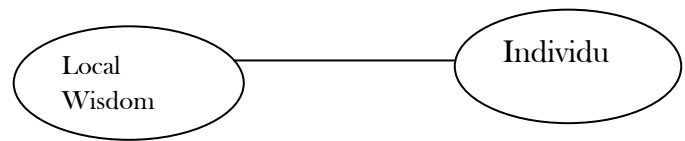
9. *Generates tourist satisfaction* (Menghasilkan kepuasan wisatawan)
10. Pengembangan ekowisata harus mampu memberikan kepuasan pengalaman kepada pengunjung untuk memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan.

Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Isnanini Mualissin dalam Hadiwijoyo (2012) memberikan gambaran mengenai model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat meliputi:

1. Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang dilakukan penduduk lokal (residen)
2. Mempromosikan dan mendorong penduduk lokal
3. Pelibatan penduduk lokal dalam industri
4. Investasi modal lokal atau wirausaha sangat dibutuhkan
5. Partisipasi penduduk dalam *event-event* dan kegiatan yang luas
6. Produk wisata yang menggambarkan identitas lokal
7. Mengatasi problem-problem yang muncul sebelum pengembangan yang lebih jauh.

Pheny Chalid, 2005 dalam Hadiwijoyo (2012), memaparkan mengenai skema pemberdayaan masyarakat seperti yang tertuang dalam gambar berikut ini.



Sumber: Pheny Chalid, 2005

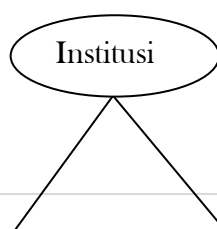
Menurut skema di atas bahwa pemberdayaan masyarakat terdiri dari institusi, individu dan lokal wisdom (kearifan lokal). Dalam hal ini institusi (pemerintah) sebagai pelindung dan pembuat kebijakan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Sementara itu dalam tatanan masyarakat memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan. Pada pelaksanaannya ketiga komponen tersebut harus saling berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu agar pelaksanaan pariwisata berbasis masyarakat berhasil maka terdapat elemen-elemen yang harus diperhatikan yaitu sumber daya alam dan budaya, organisasi-organisasi masyarakat, manajemen dan pembelajaran.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif studi kasus yang berlokasi di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Lokasi penelitian tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Karangsong memiliki kawasan rehabilitasi mangrove yang berada di kawasan pengembangan wilayah Ciyumajakuning yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018.

Sementara itu, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara :

1. *In-depth interview* terhadap pihak pemerintah terkait, ahli pariwisata, *tour*



operator, wisatawan, serta para pakar/swasta yang turut berperan dan mempunyai atensi terhadap pengembangan kepariwisataan di kawasan mangrove Desa Karangsong.

2. Observasi lapangan dalam rangka melakukan pengamatan dan pengecekan terhadap kawasan mangrove Desa Karangsong baik dalam hal atraksi wisata alam, amenitas dan aksesibilitas, pasar (wisatawan) serta terhadap keterlibatan masyarakat dalam pariwisata. Metode observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian (Sutrisno Hadi, 1987 dalam Prastowo, 2010).
3. Observasi data sekunder meliputi kajian literatur, jurnal penelitian, Indramayu dalam Angka.
4. Fokus Grup Diskusi yang melibatkan berbagai kalangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan mangrove di Desa Karangsong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Karangsong merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Desa Karangsong terletak \pm 3 km di sebelah timur dari pusat pemerintahan Kecamatan Indramayu. Luas wilayah Desa Karangsong sekitar 8,16 km berada pada ketinggian 0,5 m dari permukaan laut dengan kepadatan penduduk sebesar 1616 jiwa/km. Desa Karangsong merupakan wilayah dataran rendah non pantai dengan suhu rata-rata 30 derajat celsius.

Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu merupakan desa pemekaran dari Desa Pabean Udik. Desa Pabean Udik sebelumnya memiliki wilayah sangat luas.

Pada tahun 1980 Pemerintah Desa Pabean Udik melakukan pemekaran karena permohonan masyarakat untuk menjadi tiga desa yaitu Desa Brondong, Desa Karangsong dan Desa Pabean.

Permasalahan Pengelolaan Kawasan Mangrove

Pantai Karangsong adalah salah satu pantai yang pernah terkena dampak akibat kebocoran minyak di Indramayu tahun 2008. Wilayah Karangsong termasuk yang paling tercemar akibat minyak tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan akibat kebocoran minyak, Pertamina melakukan penanaman dan konservasi mangrove di kawasan Karangsong, upaya ini mendorong kawasan Karangsong menjadi kawasan ekowisata, hingga akhirnya oleh pemerintah dijadikan sentra pengembangan mangrove di wilayah barat Indonesia.

Hutan mangrove di Indramayu terbagi menjadi dua yaitu hutan mangrove di dalam kawasan hutan (hutan lindung) yang tersebar di 10 desa yaitu Desa Parean Girang kecamatan kandanghaur, Desa Cemara Kecamatan Losarang, Desa Cangkring dan Lamaran Tarung Kecamatan Cantigi, Desa Babadan Kecamatan Sindang dan Desa Karanganyar, Pasekan, Pagirikan, Totoran dan Pabeab Ilir Kecamatan Pasekan. Sedangkan hutan mangrove di luar kawasan hutan tersebar di 22 desa diantaranya Ujung Gebang Kecamatan Sukra, Desa Ilir, Bulak dan Parean Girang Kecamatan Kandanghaur, Desa Cemara Kecamatan Losarang, Desa Cangkring dan Lamaran Tarung Kecamatan Cantigi, Desa Brondong Karanganyar Totoran dan Pabeab Ilir Kecamatan Pasekan, Desa Pabean Udik, Karangsong dan Singaraja Kecamatan Indramayu, Desa Benda Kecamatan

Karangampel, Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat, Desa Tanjakan Kalianyar, Luwung Gesik, Krangkeng dan Singakerta Kecamatan Krangkeng.

Dalam pengelolaan mangrove masih terdapat permasalahan, sehingga pemanfaatannya belum secara optimal diperoleh karena beberapa hambatan yang dihadapi oleh masyarakat:

1. Keterbatasan pengetahuan masyarakat yang paling utama adalah penduduk pedesaan belum merasakan manfaat dengan adanya kawasan mangrove merupakan satu potensi yang bisa mendatangkan wisatawan, sehingga perlu peningkatan kesadaran masyarakat akan pariwisata dengan mewujudkan sapta pesona. Ketika masyarakat memahami bahwa daerahnya berpotensi terhadap daya tarik dari kawasan mangrove maka akan berdampak terhadap kunjungan wisatawan. Bukan hanya mangrove yang akan dikunjungi namun membawa manfaat lainnya yang saling berhubungan. Wisatawan akan memerlukan kebutuhan lain ketika berkunjung, seperti kebutuhan makanan dan minuman, fasilitas parkir, tempat menginap, membutuhkan *tour guide* untuk melihat dan mengunjungi kawasan mangrove, kebutuhan akan cinderamata berbentuk pangan maupun cinderamata yang dibuat oleh masyarakat setempat.
2. Penataan lingkungan penyangga kawasan mangrove. Menuju ke kawasan ini pasti akan melintasi akses yang sudah cukup memadai tetapi sepanjang jalan ini akan melintasi perkampungan yang dirasakan masih belum ditata dengan baik. Di pinggir sungai ada beberapa aktivitas seperti

penyimpanan kapal yang tidak teratur, pembuatan kapal ini bisa dijadikan satu daya tarik tambahan untuk pengunjung. Wisatawan akan melihat pembuatan kapal di tempat terbuka. Ketika memasuki tempat pelelangan ikan kebersihan masih belum terjaga sehingga tidak memperlihatkan daerah wisatanya atau tidak mengimplementasikan sapta pesona.

3. Pengemasan produk wisata masih harus diperhatikan untuk menarik wisatawan. Mangrove sebagai suatu kawasan yang ditunjang dengan keanekaragaman Daya Tarik yang ditimbulkan dapat dijadikan satu rangkaian perluasan Daya Tarik baik secara vertikal atau horisontal. Misalkan pengemasan sebagai Daya Tarik Wisata pada sisi vertikal atau kedalaman produk, aneka ragam/ jenis tanaman mangrove 29 macam memiliki kemenarikan tersendiri dalam pembahasan manfaat dari jenis tanaman yang dapat dilakukan sebagai wisata edukasi atau laboratorium alam. Secara horizontal pengemasan wisata mangrove tidak hanya pada jenis tanaman tapi juga biota-biota lainnya yang ada mangrove sebagai Daya Tarik maka ada manfaat lainnya yang dapat dijadikan rangkaian Daya Tarik, misalnya menuju mangrove membutuhkan perahu, sehingga dapat berbagai kegiatan dilakukan di kawasan mangrove selain wisata rekreasi, atau kegiatan lain yang berperahu, menikmati pemandangan pantai di sekitar kawasan mangrove, menuju pelelangan ikan.

Potensi Kawasan Mangrove Bagi Masyarakat Setempat Dalam Pengembangan Ekowisata

Pengembangan kawasan mangrove tidak terlepas dari lahan, sumberdaya manusia dan teknologi. Karangsong adalah desa yang berada pada kawasan pesisir pantai, banyak memiliki potensi yang bisa diolah menjadi satu produk wisata untuk meningkatkan penghasilan masyarakat:

1. Sungai yang membentang melewati desa, digunakan sebagai bersandarnya perahu dan dermaga bagi lalulintas kegiatan nelayan di Indramayu, jika dimanfaatkan secara optimal maka berbagai kegiatan akan tercipta. Selama ini sungai dan perahu hanya untuk berkegiatan nelayan dan membawa wisatawan untuk berkeliling ke perkebunan mangrove.
2. Di ujung pesisir pantai terbentang kawasan hutan mangrove seluas 20 ha yang sudah ditata dan siap untuk dikunjungi wisatawan. Hutan mangrove dikelola oleh masyarakat yang pada intinya untuk menahan abrasi (terkikisnya pesisir pantai) dikarenakan ombak besar. Dengan adanya hutan mangrove bukan hanya untuk menahan abrasi tetapi banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu di hutan ini dapat tumbuh biota satwa yang lain seperti burung, ikan dan lain-lain. Manfaat dari mangrove sendiri, mulai dari batang, daun dan buahnya dapat dijadikan produk yang memiliki nilai ekonomis.

Pembangunan pariwisata dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan tercapai bila industri pariwisata dikembangkan secara terencana dan dikelola secara profesional, seimbang dan berkelanjutan, yang pada akhirnya juga diperlukan pengawasan sehingga dampak negatif dapat diminimalisir. Ekowisata diterapkan pada Desa Karangsong karena

merupakan kegiatan yang memanfaatkan alam sebagai atraksi utamanya, dilakukan secara berkelanjutan dengan mencakup pelestarian alam, budaya dan ekonomi. Wisatawan berinteraksi dengan masyarakat lokal, sehingga ekowisata mempunyai peran sangat besar dalam hal *generating economic benefits* karena ikut membantu menciptakan lapangan kerja di daerah terpencil yang secara ekonomis belum mendatangkan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakat desa Karangsong sendiri.

Pelaksanaan ekowisata di Desa Karangsong ada beberapa komponen, pertama yang dijadikan objek yaitu alam dan lingkungan pedesaan termasuk hutan tropis, binatang dan tanaman serta budaya lokalnya. Kedua, ekowisata lebih menekankan pada kegiatan pembelajaran dalam hal ini adalah mangrove. Ketiga, ekowisata harus mengutamakan pelestarian yang mencakup alam, sosial budaya dan ekonomi. Pelaksanaan ini melibatkan dan diusahakan masyarakat setempat dalam pengelolaannya, sehingga keuntungan yang diperoleh untuk masyarakat itu sendiri. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat direalisasi jika dalam hal perencanaan pengembangan pariwisata, pertimbangan pertama yang harus dilakukan dengan memberikan proteksi sumber daya alam dan aset budaya terhadap kemungkinan pencemaran lingkungan dan kerusakan cagar budaya yang akan dijadikan bahan baku pengelolaan industri pariwisata.

Jika dilihat dari atraksi utama di Desa Karangsong ini adalah alam, sehingga bentuk wisata harus bertanggung jawab terhadap konservasi dengan mengalokasikan pada program-program pelestarian. Dalam konteks konservasi alam sebagai basis ekowisata ada hal yang harus dilakukan agar dapat melibatkan masyarakat dalam proses konservasi. Masyarakat harus mampu mengamati perubahan yang terjadi dengan *species* yang

ada melalui pelatihan serta diskusi dengan masyarakat setempat dan mengembangkan sikapnya terhadap daerah tujuan wisata walaupun sedikit kompleks karena mencakup pemahaman psikologis. Ekowisata berbasis masyarakat ini merupakan pengembangan kegiatan pariwisata yang memanfaatkan sumber daya alam maupun budaya setempat. Pengembangan hutan mangrove diarahkan kepada daerah pertambakan yang bertujuan melestarikan ekosistem seperti plankton sehingga dapat meningkatkan produksi ikan, juga berfungsi melindungi pantai dari abrasi gelombang laut.

Pembersihan pantai Karangsong juga dilakukan masyarakat bertujuan melestarikan kawasan pantai. Dengan lingkungan yang bersih diharapkan pengembangan potensi lokal dapat meningkat dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Potensi wisata di area Pantai Karangsong semakin dinikmati terutama wisatawan dalam negeri. Selain pemandangan pantai yang indah, wisatawan juga dapat melihat kesibukan para nelayan yang sedang membongkar ikan hasil tangkapan dari laut. Berikut merupakan potensi wisata di Desa Karangsong, yang teridentifikasi:

No	Potensi wisata	Deskripsi	Basis eko
1	Wisata Mangrove	Luas hutan mangrove 20 Ha	<p>Prinsip ekonomi Tanaman mangrove dari banyak manfaat pengolahan bisa di manfaatkan sebagai : Akar tua → arang Buah → juice, pewarna batik</p> <p>Prinsip Konservasi Memelihara lingkungan dan budidaya mangrove untuk pelestarian alam mencegah abrasi</p> <p>Prinsip Partisipasi Masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan budidaya dan pengolahan mangrove</p> <p>Prinsip Edukasi Mengetahui jenis-jenis mangrove dan pemanfaatannya sebagai sarana pendidikan baik bagi masyarakat maupun pengunjung</p> <p>Prinsip Wisata Memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung serta menciptakan pengalaman wisata</p>
2	Pelabuhan/dermaga	Penyebrangan dan penyandaran kapal nelayan	<p>Prinsip Edukasi Pelabuhan dapat sebagai sarana pendidikan dalam bersandar kapal, pengiriman barang, bongkar muat hasil nelayan</p> <p>Prinsip Partisipasi Masyarakat Peluang pekerjaan mengantar wisatawan ke</p>

			<p>tempat tujuan dengan melalui dermaga</p> <p>Prinsip Konservasi Prinsip Lingkungan Menjaga kebersihan, ketertiban dari pengunjung atau wisatawan yang menggunakan dermaga</p> <p>Prinsip Wisata Memberikan keamanan dan kenyamanan dalam penyediaan transportasi pengunjung dalam mengantarkan wisatawan ke tempat lain</p> <p>Prinsip Ekonomi Pelabuhan salah satu tempat berlabuh kapal dalam memindahkan wisatawan ketempat lain secara ekonomis dapat memberikan nilai bagi pelaku yang memanfaatkan pelabuhan tersebut</p>
3	TPI (tempat pelelangan Ikan)	Pengumpulan hasil Nelayan dan tempat penjualan Ikan	<p>Prinsip Wisata Menerapkan pada nelayan akan sadar wisata melalui pelatihan sapta pesona</p> <p>Prinsip Ekonomi Dijadikan penghasilan bagi nelayan dan makanan</p> <p>Prinsip Konservasi Tetap memelihara limbah dari hasil tangkapan ikan , tidak membuang limbah membersihkan ikan ke pembuangan disekitar pelabuhan</p>
4	Pembuatan Kapal	Industri pembuatan Kapal	<p>Prinsip Wisata Dimanfaatkan sebagai sungai terapung (sebagai sarana rekreasi)</p> <p>Prinsip Ekonomi Model transportasi juga perahu untuk jualan hasil bumi</p>
5	Restoran	Rumah makan yang dibutuhkan sebagai imbas dari adanya kegiatan wisata	<p>Prinsip Ekonomi Kebijakan disiapkan dalam menopang kegiatan yang ada di kawasan disesuaikan untuk kebutuhan bisnis</p> <p>Prinsip wisata Menerapkan sapta pesona dan memelihara/melestraikan makanan khas local</p> <p>Prinsip pemberdayaan Msy Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan peluang pekerjaan</p>
6	Sungai	Tempat	Prinsip Edukasi

		penyimpanan kapal kapal nelayan dan aliran sungai Cimanuk yg akan bermuara kelaut	Menjadi tempat belajar mengenal manfaat sungai dan kegiatan yang dapat dilakukan di sungai Prinsip Partisipasi Masyarakat Mengoptimalkan penggunaan perahu-perahu kecil bukan hanya untuk mencari ikan tapi masyarakat dapat menggunakan pada saat perahu istirahat dapat disewakan untuk kegiatan berwisata Prinsip Konservasi Ketika sungai menjadi daya Tarik maka sungai harus dipelihara kebersihannya, pengerukan secara berkala dan penataan dengan baik
7	Pantai	Aktivitas wisatawan yang bisa dilakukan dalam mengeksplor pemandangan laut dan tempat berinteraksi wisatawan	Prinsip Lingkungan Penduduk pantai bekerja sama dalam pembersihan pantai mengacu pada MMF

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2017

Model Pengembangan Ekowisata Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Desa Karangsong

Ekowisata merupakan wisata alternatif yang menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Karangsong, karena dengan adanya ekowisata dapat memberikan kesempatan kerja juga mengembangkan kemampuan berusaha masyarakat pedesaan. Kegiatan ekowisata juga dapat mengontrol penggunaan sumber daya alam di daerah Desa Karangsong. Tujuan ekowisata adalah memanfaatkan sumber alam atau daerah yang relatif belum berkembang atau masih memiliki budaya asli dengan mempromosikan konservasi alam yaitu mengurangi dampak lingkungan alam juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pedesaan Karangsong. Dari total luas wilayah Desa Karangsong, sekitar

204 ha atau 1/4 total luas wilayah dimanfaatkan sebagai lahan tambak ikan. Hal ini berimplikasi pada mata pencaharian masyarakat yang sebagian petani tambak ikan dan nelayan.

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dapat mempromosikan konservasi ekologi, meningkatkan pendidikan serta interpretasi terhadap sumber alam dan budaya serta meningkatkan partisipasi masyarakat lokal. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat biasanya membutuhkan infrastruktur yang lebih sederhana dan murah secara ekonomi. Ciri khas ekowisata ini berskala kecil dan dioperasikan oleh masyarakat seperti mangrove, yang keuntungannya dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal.

Keikutsertaan masyarakat yang aktif dalam pengembangan mangrove ini merupakan suatu prasyarat, meskipun

dalam prakteknya ada kendala misalnya kecurigaan masyarakat terhadap daerah tujuan wisatanya dimarginalkan. Namun dengan pelaksanaan, manajemen serta kontrol, pengikutsertaan anggota masyarakat sejak awal dengan FGD, pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh LSM maupun tokoh dari masyarakat tersebut, memberikan pengertian bahwa masyarakat setempat yang nantinya sebagai pemilik, operator ataupun pelaksanaan kegiatan di daerah wisata mangrove ini, sehingga keuntungan akan langsung berdampak pada masyarakat yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di Desa Karangsong. Sebagai contoh dari hasil wisatawan yang menggunakan perahu untuk menikmati hutan mangrove, dengan tarif per orang yang hanya dikenakan biaya Rp 5000,- masyarakat setempat bisa mendapatkan hasil hingga 2 juta rupiah, hasil yang cukup memadai mengingat kawasan ekowisata ini masih dalam pengembangan.

Mangrove di Karangsong selain untuk pelestarian lingkungan juga dijadikan sebagai ekowisata dan sudah memberikan keuntungan ekonomis bagi warga sekitar. Di arboretum Karangsong ditanam 23 jenis mangrove yang dipelihara secara baik dan dibudi daya, sehingga selain menjadi kawasan ekowisata, juga dipanen untuk menghasilkan bahan olahan pangan.

Pertamina Balongan selain giat dalam penanaman dan konservasi mangrove di Karangsong, juga memberikan CSR dalam bentuk bantuan pemberdayaan usaha UKM pengolahan pangan mangrove. Bekerja sama dengan kelompok Jaka Kencana dan kelompok Pantai Lestari, telah dihasilkan kurang lebih 8 jenis bahan olahan makanan yang berasal dari mangrove seperti kecap, dodol, kripik hingga *syrup* mangrove. Peran Pertamina selain melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pesisir pantai Karangsong, sehingga lingkungan yang

pernah rusak karena kebocoran minyak, sekarang berhasil menjadi daerah ekowisata dan menjadi sentra penelitian tanaman mangrove.

Selain itu pemberdayaan perekonomian melalui produksi bahan olahan makanan dari mangrove perlu ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan, melakukan standarisasi produk olahan sehingga produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. Industri kelas menengah yang menggunakan mesin-mesin semi otomatis sudah dapat digunakan, mengingat potensi mangrove yang sangat besar.

Otoritas Jasa Keuangan bersama Lembaga Jasa Keuangan memberikan layanan keuangan mikro, yang dipusatkan di Tempat Pelelangan Ikan. Hal ini dikarenakan Karangsong merupakan desa nelayan yang memproduksi perikanan mencapai 50-70 ton per hari, dengan omset pelelangan di TPI mencapai 1 miliar rupiah per hari. Nelayan Karangsong sekarang sudah modern dalam mencari ikan menggunakan data satelit. Kegiatan OJK merupakan upaya dalam mendorong industri keuangan untuk memiliki layanan mikro terhadap rakyat kecil dan UMKM.

Model kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan industri pariwisata, potensi yang ada dioptimalkan dengan cara menyadarkan masyarakat akan potensi di lingkungannya. Langkah pengembangan untuk masyarakat, melalui perluasan pengembangan produk mangrove. Tanaman mangrove dapat diolah menjadi kosmetik, makanan dan memperluas kawasan konservasi. Dari kosmetik bisa menjadi lulur, tabir surya atau masker. Hal ini baru terbatas pengolahan belum menjadi produk yang dapat diproduksi secara massal karena keterbatasan SDM, serta sumber alam (pohon mangrove). Di Desa Karangsong ini masih menghadapi keterbatasan membuka lapangan pekerjaan dan mendidik masyarakat untuk membuat produk tersebut.

Pemerintah dapat melakukan pengujian dan memberikan sertifikasi halal dan layak pakai dengan membuat kebijakan melindungi produk tersebut sehingga layak untuk dijual dan menjamin keamanan produk tersebut jika dikonsumsi. Adapun model kolaborasi yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan industri pariwisata itu sendiri terdiri dari:

1. PHRI, pelatihan *home stay*, pelayanan, pengemasan makanan sampai dengan CSR
2. Asita, pelatihan *guide*, pembuatan paket wisata
3. Pendidikan, pengabdian masyarakat, sadar wisata, penemuan potensi baru.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan diartikan sebagai bentuk pengembangan ekonomi antara lain dengan program:

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, minimal untuk masyarakat yang ada di sekitar.
2. Peningkatan kualitas pelayanan bagi wisatawan yang datang berkunjung ke DTW
3. DTW yang dibangun memberikan citra positif bagi Desa Karangsong.

Model kolaborasi ini dapat menjadi alternatif sektor ekonomi untuk mempercepat menanggulangi kemiskinan, sektor ekonomi dianggap cukup memiliki prospek adalah sektor pariwisata. Hal ini cukup beralasan karena pariwisata memiliki andil dan memberikan kontribusi cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil di pedesaan Karangsong.

Keterlibatan langsung masyarakat yang berpendapatan rendah dalam program-program pengembangan pariwisata melalui pemanfaatan kerajinan tangan, hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, produk hasil seni dan budaya tradisional serta pengembangan desa wisata sangat membantu usaha pengentasan kemiskinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan mengembangkan mangrove di Desa Karangsong akan memelihara kelestarian alam dan konservasi alam, selain itu ekowisata dapat juga melestarikan aspek sosial dan budaya yang pengembangannya mengikutsertakan masyarakat lokal. Dengan model pengembangan ini meskipun berskala kecil, konservasi alam, sosial dan budaya dapat ditingkatkan sampai kepopulerannya dapat berkembang menjadi pariwisata massal, sehingga secara tidak langsung pengentasan kemiskinan akan tercapai.

Dengan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat diharapkan kunjungan wisatawan tetap stabil atau meningkat, yang pada akhirnya akan mengentaskan kemiskinan di Desa Karangsong Indramayu. Pariwisata dapat berfungsi sebagai katalisator dalam pembangunan dan sekaligus menjadi penggerak dan mempercepat proses pembangunan itu sendiri.

Saran

Perencanaan terpadu antara pemerintah dan penduduk desa setempat untuk melaksanakan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat (*community based ecotourism*) dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu, ada 5 faktor yang harus diperhatikan agar mencapai sasaran:

1. Semua yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata, harus menjaga keseimbangan ekologi dan terjadinya kerusakan lingkungan harus dihindari.
2. Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri harus selalu dapat

mempertahankan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat dengan jalan meningkatkan kewaspadaan terhadap tingkah laku wisatawan yang tidak sesuai dengan budaya setempat

3. Pengembangan ini melibatkan rakyat banyak, khususnya penduduk lokal mendapat kesempatan ikut berpartisipasi dan tidak hanya menjadi penonton di kampung sendiri
4. Pengembangan pariwisata dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan
5. Peraturan pemerintah dapat diimplementasi dalam peraturan desa yang akan memperkuat pelestarian kawasan mangrove.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat 2015, Tingkat Kemiskinan Jawa Barat. No. 05 /01/32/Th. XVII
- Darmadi. 2010. Ekosistem Hutan Mangrove Di Pantai Karangsong Indramayu. <https://dhamadharma.wordpress.com>.
- Fandeli, C., 1999, *Pengembangan Kepariwisata Alam : Prospek dan Problematikanya, Seminar dalam rangka memperingati Hari Bumi, Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan*, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Fennel, David A.,1999, *Ecotourism : An Introduction*, Routledge, London and New York.
- Garrod, B dan JC Wilson. 2003. *Marine Ecotourism. Issues and Experiences*. Channel View Publication. England
- Hill, Jennifer dan Gale, Tim (Eds.). 2009. *Ecotourism and Environmental Sustainability: Principles and Practice*. Burlington: Ashgate.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012 *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat*, Graha Ilmu Jogjakarta <http://www.disparbud.jabarpro>
- Kompasiana.com, 15 Juli 2016. 7 Keunikan Hutan Mangrove Karangsong Indramayu.
- Murphy, P.E., 1985 *Tourism: A Community Approach* London: Methuen,
- Prastowo, A. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar - Ruzz. Yogyakarta.
- RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018
- Satria, D. 2009. Strategi pengembangan ekowisata berbasis ekonomi lokal dalam rangka program pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics* 3(1):37-47.
- Soedigdo, Doddy & Priono. Peran Ekowisata dalam konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di taman wisata alam TWA (Bukit Tangkiling Kalimantan Tengah). *Jurnal Perspektif Arsitektur*. Vol. 8 no. 2 Desember 2013
- Susenas Triwulan III 2014, *Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2014 - September 2014*
- UU Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009
- World Tourism Organization, 2002. *Enhancing the Economic Benefits of Tourism for Local Communities and Poverty Alleviation*. Madrid, Spain.